

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2012

TANGGAL 13 MARET 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 khususnya dalam pasal 27 ayat (2) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 menegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Laporan keterangan dimaksud disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 23 peraturan pemerintah dimaksud bahwa LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD, berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD, Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, merupakan informasi dari Pemerintah kepada DPRD terkait dengan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun. Diharapkan melalui tertib dan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban ini, dapat lebih meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka

peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya implementasi terhadap pencapaian target pelaksanaan program/ kegiatan SKPD tahun 2012, sesuai amanat yang tertuang dalam peraturan Walikota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate Tahun 2011-2015.

Dalam konteks inilah sebagai wujud dari kewajiban kontitusional tersebut, pada kesempatan ini kami sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Ternate Tahun Anggaran 2012, dengan format dan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- A. Dasar Hukum
- B. Gambaran Umum Daerah

BAB II Kebijakan Pemerintahan Daerah

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah
- C. Prioritas Daerah

BAB III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

- A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
- B. Pengelolaan Belanja Daerah

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

- A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
- B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

BAB V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
- B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

BAB VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

- A. Kerjasama Antar Daerah
- B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
- C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
- D. Pembinaan Batas Wilayah
- E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
- F. Pengelolaan Kawasan Khusus
- G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

BAB VII Penutup

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Isu Strategis dan Permasalahan Khas Perkotaan

Sebelum masuk pada pembahasan kebijakan pemerintah daerah, yaitu implementasi terhadap pelaksanaan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Ternate Tahun 2012. Pada bagian ini akan dijelaskan terlebih dahulu permasalahan atau isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam tahun 2012, adalah sebagai berikut :

1. Masalah Sumber Daya Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - Profesionalitas serta kompetensi aparatur birokrasi belum optimal, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan publik.
 - Kualitas perencanaan teknis dan pengawasan lapangan masih rendah, sehingga berimplikasi pada beberapa program/ kegiatan yang tidak terealisasi tepat waktu.
 - Belum efektifnya akses partisipasi publik yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin akuntabilitas serta transparansi kebijakan anggaran (*clean governance*) sebagai implementasi prinsip-prinsip *good governance*.
 - Belum terintegrasinya sistem pelayanan publik, sehingga menimbulkan biaya tinggi akibat faktor mata rantai birokrasi yang panjang.
 - Tugas dan fungsi pelayanan di kecamatan dan kelurahan belum optimal, karena belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya manusia dan pendelegasian kewenangan yang memadai.
2. Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan.
 - Tidak seimbangya pertumbuhan antar wilayah, terutama wilayah Utara dan Selatan Ternate, termasuk wilayah

Kecamatan di luar pulau Ternate, seperti Moti, Hiri dan Batang Dua. Kesenjangan pembangunan antar wilayah ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

- Belum sinerginya kegiatan ekonomi perkotaan dengan kegiatan ekonomi pedesaan, sehingga wilayah luar cenderung mengalami dampak penurunan pertumbuhan (*backwash effects*).
- Terbatasnya akses permodalan bagi UMKM dalam rangka penguatan ekonomi lokal.
- Informasi potensi dan peluang usaha belum optimal di promosikan, padahal Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan jasa utama di Maluku Utara memiliki peluang investasi yang cukup tinggi.
- Akses usaha yang belum merata, dan rendahnya produktifitas ketenagakerjaan. Ketergantungan terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar adalah situasi rentan terhadap kemandirian ekonomi rakyat.
- Masih kurangnya infrastuktur jasa dan perdagangan, terutama dalam menampung kebutuhan PKL.

3. Masalah Penataan Kawasan Perkotaan.

- Tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk baik akibat penambahan penduduk alamiah maupun akibat urbanisasi sehingga melahirkan kawasan pemukiman kumuh dan kemiskinan kota.
- Karena keterbatasan lahan kota dan inkonsistensi kebijakan penataan ruang membuat terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran baik di wilayah pesisir pantai maupun kawasan hutan lindung.
- Belum terintegrasinya keruangan (*spatial integration*) secara seimbang pada setiap simpul strategis wilayah perkotaan.

- Belum tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga kota akibat kebijakan komersialisasi kawasan perkotaan serta desain tata ruang yang belum memihak kebutuhan publik.
 - Kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL yang menimbulkan marginalisasi sektor informal dari sistem ekonomi perkotaan secara integratif.
 - Terabaikannya potensi kawasan pesisir pantai dengan tidak tersedianya prasarana dan sarana kelautan yang berakibat pada menurunnya aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai.
 - Belum mandiri dan terarahnya pembangunan Kota Baru sehingga mengakibatkan, masyarakat pada kawasan sekitar membangun pemukimannya tanpa memperhatikan penataan wilayah dan kawasan yang sesuai dengan konsep penataan ruang.
 - Kesemerawutan kota, akibat pertumbuhan kendaraan bermotor tanpa diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan dan regulasi yang sering tidak konsisten. Minimnya lahan parkir menjadi penyebab utama kemacetan di beberapa pusat perdagangan. Ruang publik bagi pejalan kaki tidak lagi berfungsi karena difungsikan bagi PKL.
4. Masalah Banjir, Sampah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Menurunnya kualitas fisik lingkungan perkotaan, sebagai implikasi dari eksploitasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan yang tidak diikuti dengan penataan ruang yang baik dan konsisten.
 - Penataan drainase dan pengelolaan persampahan yang belum memadai.

- Minimnya kesadaran warga terhadap lingkungan hidup yang baik menimbulkan masalah banjir, sanitasi yang buruk dan terjadinya abrasi pada wilayah pantai.
- Kebijakan pemerintah kota yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan dalam pembangunan perkotaan.

5. Masalah Pendidikan, Kesehatan

- Kualitas output pendidikan yang masih rendah sehingga belum mampu menjawab kesempatan kerja yang tersedia.
- Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat.
- Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mudah, murah, berkualitas dan merata, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Moti, Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua.
- Komersialisasi kesehatan ini ditandai dengan mahalnya biaya kesehatan akibat pelayanan rumah sakit yang belum profesional akibat praktek dokter ahli lebih memilihi berpraktek di rumah sakit swasta atau klinik ketimbang melayani pasien di RSUD.
- Manajemen pelayanan rumah sakit yang belum mengakomodasi masyarakat miskin (Jamkesda) dan pemegang askes.
- Masih rendahnya proporsi anggaran kesehatan dalam APBD.
- Kematian ibu dan bayi, yang masih cukup tinggi adalah akibat dari buruknya akses pelayanan kesehatan yang tersedia.

6. Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan.

- Masih rendahnya kesadaran budaya hidup toleran masyarakat terutama dalam hal penutupan jalan untuk acara-acara tertentu.

- Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat.
- Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kasus perkosaan dan meningkatnya angka perceraian di kota Ternate adalah fenomena yang harus menjadi perhatian kita semua. Fenomena PSK di Kota Ternate adalah penyakit sosial yang berhubungan erat dengan kehidupan ekonomi dan isu moralitas. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kaum wanita dan terpinggirkan peran wanita dalam pembangunan seperti, masih bias gender dalam penerimaan pegawai, promosi jabatan dan diskriminasi dalam dunia kerja. Fenomena ini tidak lagi menjadi isu domestik perempuan tetapi isu mendasar pembangunan Kota Ternate kedepan.
- Belum sinerginya integrasi sosial masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam membuat kebijakan publik yang menyangkut masyarakat.
- Penanganan masalah sosial budaya yang terkait dengan masalah kemiskinan perkotaan, gesekan kepentingan antar masyarakat dan antar kampung.
- Makin menjauhnya sebagian besar masyarakat dari nilai adat budaya lokal, termasuk pemaknaan atas *adat se atoran* sebagai sumber nilai dan etos sosial, yang terbukti ampuh menjadi nilai identitas masyarakat Ternate pada masa kejayaannya.
- Berkurangnya perhatian dan kesadaran pemerintah daerah, dan stakeholder di daerah, untuk melakukan rekonstruksi nilai budaya dan kearifan lokal.
- Belum maksimalnya peran lembaga keagamaan serta perhatian yang hanya fokus pada sarana prasarana tanpa

penguatan basis nilai religiusitas semakin menjauhkan warga dari nilai-nilai agama.

- Masih tingginya angka buta baca Al-Quran di Kota Ternate.

7. Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal.

- Kurangnya kemandirian fiskal Kota Ternate tergambar dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam pembiayaan APBD. Ketimpangan fiskal yang tinggi menunjukkan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi sehingga kontribusi pendapatan pajak dan retribusi belum signifikan dalam pendapatan daerah Kota Ternate.
- Masih kurangnya alokasi anggaran untuk belanja modal (investasi) padahal belanja modal ini penting bagi stimulus ekonomi kota di masa yang akan datang, terutama infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, air minum dan transportasi.

8. Masalah Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level makro ternyata tidak diikuti pada ekonomi riil di level mikro. Fenomena kemiskinan dan pengangguran adalah gambaran tidak terkoneksi antara gambaran makro ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Inflasi yang masih cukup tinggi telah menurunkan pendapatan riil warga dan pada akhirnya menurunkan daya beli. Kurangnya akses sumberdaya ekonomi dan belum meratanya pembangunan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

2. Tahapan Pembangunan RPJM Kota Ternate Tahun 2012, Target Dan Capaian Kinerja Ekonomi Kota Ternate Tahun 2012

Dalam upaya mewujudkan **Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan”** atau **Bahari Berkesan** sebagai tujuan akhir

periodisasi, maka perlu disusun suatu pentahapan pembangunan Kota Ternate 2011-2015, yang telah ditetapkan dalam 5 tahapan pembangunan dengan penguatan pada 11 Program Prioritas disetiap tahapannya, untuk tahap pembangunan 2012 merupakan tahapan untuk memperkuat landasan pembangunan menuju Kota Ternate Bahari Berkesan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Disamping itu juga dilakukan penataan infrastruktur perkotaan sebagai Kota Jasa dan Perdagangan dengan pemanfaatan Ruang Kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktifitas perkotaan yang tertib.

Pembangunan di tahun 2012 lebih menegaskan komitmen untuk penguatan pada 2 (Dua) program sebagai fokus utama pembangunan di Tahap II, antara lain :

1. **Mewujudkan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat;** yang diarahkan pada kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat, yang diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melalui desain program berbasis keswadayaan dan berciri budaya.
2. **Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota Yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, Antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Kesenjangan Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis;** yang diarahkan pada penataan infrastruktur perkotaan sebagai Kota Jasa dan Perdagangan dengan pemanfaatan Ruang Kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktifitas perkotaan yang tertib

menuju terwujudnya Kota Ternate yang harmoni, sehat, aman dan nyaman dan berciri budaya serta berwasasan lingkungan.

Disamping melaksanakan penguatan pada 2 program prioritas tahun 2012 Pentahapan RPJM Kota Ternate 2011-2015, juga telah terimplementasi sejumlah program/kegiatan SKPD untuk 9 Program Prioritas lainnya yang bersifat strategis dan populis, yang secara bersinergi telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi makro Kota Ternate di tahun 2012. Sebagaimana penjelasan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kinerja Ekonomi Makro Kota Ternate
Tahun 2012

NO	INDIKATOR EKONOMI	TAHUN 2011	TAHUN 2012
1.	Pertumbuhan Ekonomi	8,07 %	8.21 %
2.	Inflasi	4,52 %	3.29 %
3.	Pendapatan Perkapita	Rp. 2.928.618,-	Rp. 2.985.750,-
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,66 %	7.26 %
5.	PDRB Harga Berlaku	Rp. 1,14 Triliyun	Rp. 1,16 Triliyun

Capaian ini menjelaskan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Ternate melalui APBD tahun anggaran 2012, telah mampu mendorong peningkatan pada beberapa indikator ekonomi makro di 9 sektor PDRB Kota Ternate. Kota Ternate sebagai pintu gerbang Provinsi Maluku Utara mempunyai nilai lebih dari sudut pandang ekonomi dibandingkan daerah lain. Sampai akhir tahun 2012 perekonomian Kota Ternate tumbuh sebesar 8,21 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2011 yaitu sebesar 8,01 persen. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dihasilkan dari hasil penelitian kerjasama antara Bappeda Kota Ternate dengan Pusat Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Khairun Ternate, yang dimana dalam

hasil *shift share analysis* (analisis sektor) dengan 3 (tiga) pendekatan menunjukkan secara *regional share*, pertumbuhan seluruh sektor-sektor ekonomi Kota Ternate menunjukkan hasil yang positif. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa secara sektoral pertumbuhan ekonomi Kota Ternate tahun 2012 cukup baik. Demikian pula jika dilihat secara *proportional shift*-nya, dengan membandingkan tahun periode sebelumnya, maka seluruh sektor-sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif, itu artinya secara sektoral pertumbuhan ekonomi Kota Ternate tergolong dengan tingkat pertumbuhan yang cepat.

Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Ternate maka nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 diprediksi sebesar 1.16 trilyun rupiah atau lebih tinggi dibanding tahun 2011 yaitu tercatat sebesar 1.14 trilyun rupiah. Dengan adanya peningkatan tersebut mengindikasikan telah terjadi peningkatan produktivitas pada sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Tercatat telah terjadi peningkatan pendapatan perkapita Kota Ternate di tahun 2012 sebesar Rp. 2.985.750,- jika dibandingkan di tahun 2011 sebesar Rp. 2.928.618,-.

Semakin membaiknya pendapatan perkapita masyarakat di tahun 2012 secara langsung mempengaruhi permintaan masyarakat akan barang dan jasa di Kota Ternate. Permintaan tersebut tidak sampai berdampak pada masalah inflasi. Inflasi di Kota Ternate pada tahun 2012 mampu dikendalikan pada kisaran 3,29 persen jika dibandingkan dengan tahun 2011 tingkat inflasi mencapai 4,52 persen. Tingkat inflasi tahun 2012 masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Inflasi nasional sebesar 4,30 persen.

Perkembangan ekonomi yang membaik pada tahun 2012 memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian secara menyeluruh. Hal ini memberi pengaruh positif pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Ternate tahun 2012 yang tercatat sebesar 7.26 persen (hasil Sakernas Agustus 2012), angka ini mengalami penurunan/lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar 8.66 persen, yang secara konseptual mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana pada tahun 2011 nilai IPM Kota Ternate meningkat menjadi 77,05 persen dan masih merupakan peringkat pertama di Propinsi Maluku Utara dan pada tahun 2012 IPM Kota Ternate diprediksi akan terus meningkat.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan Pemerintahan Kota Ternate, berpedoman pada Visi-Misi dan 11 Program Prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJM Kota Ternate, dengan Visi yaitu:

TERWUJUDNYA TERNATE MENJADI KOTA “BERBUDAYA, AGAMAS, HARMONIS, MANDIRI, BERKEADILAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”.

2. MISI

Misi merupakan instrumen penting untuk menjabarkan Visi Kota Ternate 2011-2015, maka Misi Kota Ternate meliputi :

1. Mewujudkan Ternate Yang Agamis.
2. Mewujudkan Pemerataan Sarana Dan Prasarana Perekonomian Yang Lebih Representatif.
3. Membangun Ternate Sebagai Kota Pesisir Berbasis Lingkungan.
4. Membangun Ternate Sebagai Kota Pariwisata Berciri Budaya Dan Bahari.
5. Membangun Ternate Sebagai Kota Terbuka, Demokratis dan Adil.
6. Membangun Ternate Yang Sehat Dan Sejahtera.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengacu pada Visi dan Misi Kota Ternate dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate 2011-2015, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah meliputi :

1. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Pertama

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Pertama** :

Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur Pada Wilayah Kecamatan, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Mempercepat pembangunan sarana infrastruktur wilayah di luar kawasan perkotaan berupa pemerataan pelayanan Air Bersih dan pelayanan Listrik pada kecamatan Hiri, Moti dan Batang Dua.

2. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Dua

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Dua** :

Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan mutu pendidikan pada semua tingkatan dengan alokasi dana penunjang melalui APBD, serta pemberian beasiswa dan insentif.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Tiga

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Tiga** :

Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran, yang menjangkau seluruh masyarakat miskin.

4. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Empat

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Empat** :

Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat,

strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Menetapkan *One Village One Program* dengan penguatan pada kapasitas aparatur, serta membangun rumah Layak Huni Keluarga Kurang Mampu dengan dana stimulus Pemerintah Daerah yang melibatkan keswadayaan masyarakat melalui budaya Gotong Royong atau Bari.

5. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Lima

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Lima** :

Penataan, Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Kota Yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, Antar Aspek Topografi Dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya Dan Ekologis, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: Penataan kawasan tapak I plus, tapak II dan penataan taman kota serta ruang terbuka hijau perkotaan sebagai area publik yang asri, nyaman dan tertib dan mendorong partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota Pantai yang Hijau, Asri, Bersih, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.

6. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Enam

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Enam** :

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, Bersih Dan Berwibawa, Serta Birokrasi Yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif Dan Responsif, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Melakukan penataan organisasi perangkat daerah guna mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional, bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif dan responsif dalam optimalisasi kinerja fungsi dan tugasnya.

7. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Tujuh

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Tujuh** :

Peningkatan Ekonomi Rakyat, Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan pengembangan Koperasi dan UMKM serta Pedagang Tradisional dan PKL dengan memberikan kemudahan izin usaha pada masyarakat kurang mampu serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin usaha bagi Investor.

8. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Delapan

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Delapan** :

Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Membangun pelayanan satu titik (*one stop services*), untuk pelayanan publik, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.

9. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Sembilan

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Sembilan** :

Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan, strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

Pemetaan potensi masyarakat pesisir, penyediaan sarana prasarana nelayan serta memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pedampingan pemberdayaan.

10. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Sepuluh

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Sepuluh** :

Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan pembinaan kerukunan Antar Ummat Beragama, Antar Suku, Etnis dan Subetnis, melalui penguatan Kurikulum Pendidikan Agama dan kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate.

11. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Sebelas

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Sebelas** :

Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, Untuk Mendorong Partisipasi Publik Yang Dinamis dan Konstruktif, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Memperkuat regulasi terhadap partisipasi publik yang dinamis, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan mengutamakan Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik.

C. PRIORITAS DAERAH

Sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan dengan memperhatikan permasalahan khas perkotaan dan kondisi obyektif, maka program prioritas daerah mengacu pada 11 Program Prioritas Kota Ternate 2011-2015, sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur Pada Wilayah Kecamatan

2. Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas
3. Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas
4. Kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat
5. Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, Antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis
6. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, Serta Birokrasi Yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif
7. Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja
8. Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah
9. Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan
10. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan
11. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sebagaimana kita ketahui untuk menjaga kelangsungan pembangunan di daerah, maka faktor yang sangat penting adalah dengan tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah yang memadai, oleh karena itu segala upaya ditempuh oleh daerah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan di daerah, antara lain meliputi :

1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dalam tahun 2012 adalah kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, yang meliputi antara lain :

a. Kegiatan Intensifikasi

1. Pendataan : adalah mendata objek-objek pajak dan retribusi baru yang belum didata dengan tujuan untuk memperluas dan menambah potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Pendaftaran : adalah mendaftarkan objek-objek pajak dan retribusi baru dengan tujuan untuk menerbitkan NPWPD, agar dapat mengetahui secara konkrit jumlah potensi pajak dan retribusi daerah.
3. Penetapan : adalah mengadakan perhitungan dan menetapkan besaran nilai pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Penagihan : adalah mengadakan penagihan kepada semua wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang sudah terdaftar.

b. Kegiatan Ekstensifikasi

1. Membuat peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
2. Melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi.
3. Melakukan kegiatan pengkajian atau survey ke daerah yang lebih maju dengan karakteristik yang hampir sama dengan Kota Ternate untuk dapat mengetahui kemungkinan adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang lain.
4. Mengikutsertakan aparat pengelola pendapatan dalam kegiatan seminar dan workshop, baik pada tingkat lokal maupun nasional dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang pendapatan.
5. Melakukan pengawasan lapangan terkait dengan objek-objek pajak dan retribusi.
6. Melakukan koordinasi secara berkala dengan SKPD pengelola pendapatan.

2. Target Dan Realisasi Pendapatan

Adapun target pendapatan daerah Kota Ternate tahun 2012 sebesar Rp. 585.401.542.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 570.892.852.658,- atau 97,52% dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Adapun target Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate pada tahun 2012 sebesar Rp. 38.435.000.000,- dan realisasi hingga akhir

tahun dapat mencapai sebesar Rp. 31.466.406.283,- atau 81,87%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada tahun 2012 sebesar Rp. 19.060.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 17.777.068.201,- atau 93,27 %.

2. Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada tahun 2012 sebesar Rp. 12.275.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 9.681.584.386,- atau 78,87 %.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 292.560.386,- atau 58,51 %.

4. Lain-lain PAD Yang Sah

Adapun target lain-lain PAD yang sah pada tahun 2012 sebesar Rp. 6.600.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 3.715.193.310,- atau 56,29 %.

b. Dana Perimbangan

Adapun target Dana Perimbangan pada tahun 2012 sebesar Rp. 495.331.085.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 488.430.685.996,- atau 98,61 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak

Adapun target bagi hasil pajak pada tahun 2012 sebesar Rp. 39.000.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 28.013.843.264,- atau 71,83 %.

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Adapun target bagi hasil sumber daya alam pada tahun 2012 sebesar Rp. 8.377.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 12.462.757.732,- atau 148,77 %.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Adapun target dana alokasi umum pada tahun 2012 sebesar Rp. 404.588.285.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 404.588.285.000,- atau 100 %.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adapun target dana alokasi khusus pada tahun 2012 sebesar Rp. 43.365.800.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 43.365.800.000,- atau 100 %.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Adapun target Lain-lain Pendapatan Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp. 51.635.457.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 50.995.760.379,- atau 98,76%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak Propinsi

Adapun target bagi hasil pajak propinsi pada tahun 2012 sebesar Rp. 11.017.366.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 10.479.032.628,- atau 95,11%.

2. Dana Penyesuaian

Adapun target dana penyesuaian pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 37.085.691.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 37.197.651.680,- atau 100,30 %.

3. Penerimaan Lainnya

Adapun target penerimaan lainnya pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.532.400.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 3.319.076.071,- atau 93,96%.

Secara jelas Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ternate tahun 2012 berdasarkan jenis penerimaan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Ternate Tahun 2012

No Rek	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	I. PAJAK DAERAH			
1.1	PAJAK HOTEL	1.300.000.000	1.514.697.089	116,52
1.2	PAJAK RESTORAN	2.900.000.000	3.265.093.802	112,59
1.3	PAJAK HIBURAN	115.000.000	155.959.496	135,62
1.4	PAJAK REKLAME	845.000.000	1.031.283.480	122,05
1.5	PAJAK PENERANGAN JALAN	8.000.000.000	8.312.451.028	103,91
1.6	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2.500.000.000	1.206.246.000	48,25
1.7	PAJAK PARKIR	150.000.000	74.153.400	49,44
1.8	PAJAK AIR TANAH	550.000.000	167.584.613	30,47
1.9	PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	2.700.000.000	2.049.599.293	75,91
	TOTAL PAJAK DAERAH	19.060.000.000	17.777.068.201	93,27
	II. RETRIBUSI DAERAH			
2.1	RET. PEL. PERSAMPAHN/KEBERSHN	1.750.000.000	1.656.908.500	94,68
2.	RET. PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CAPIL	490.000.000	220.030.000	44,90
2.3	RET. PARKIR DITEPI JALAN UMUM	1.300.000.000	1.033.800.000	79,52
2.4	RET. P A S A R	3.600.000.000	2.831.662.165	78,66
2.5	RET. PENGUJIAN KEND. BERMOTOR	250.000.000	149.765.000	59,91
2.6	RET. PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	750.000.000	555.720.000	74,10
2.7	RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERH	250.000.000	255.332.420	102,13
2.8	RET. T E R M I N A L	500.000.000	385.400.000	77,08
2.9	RET. PENYEDOTAN KAKUS	80.000.000	19.550.000	24,44
2.10	RET. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	1.035.000.000	835.071.626	80,68
2.11	RET. IZIN GANGGUAN	900.000.000	938.622.675	104,29
2.12	RET. IZIN TRAYEK	85.000.000	22.165.000	26,08
2.13	RET. IZIN REKREASI DAN OLAHRAGA	255.000.000	171.009.000	67,06
2.14	RET. RUMAH POTONG HEWAN	100.000.000	63.765.000	63,77
2.19	RET. TEMPAT KHUSUS PARKIR	365.000.000	338.200.000	92,66
2.20	RET. IZIN PERIKANAN	300.000.000	13.390.000	4,46
2.21	RET. PELAYANAN KEPELABUHANAN	175.000.000	191.193.000	109,25
2.22	RET. PELAYANAN TERA/TERA ULANG	30.000.000	-	0,00
2.23	RET. PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA	30.000.000	-	0,00
2.24	RET. TEMPAT PELELANGAN	30.000.000	-	0,00
	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	12.275.000.000	9.681.583.386	78,87
	III. KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN			
3.1	BAGIAN LABA PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	500.000.000	292.560.386	58,51
	TOTAL KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	500.000.000	292.506.386	58,51
	IV. LAIN-LAIN PAD YANG SAH			
4.1	HASIL PENJUALAN ASSET DAERAH YG TIDAK DIPISAHKAN		26.954.100	-
4.2	SUMBANGAN PIHAK KETIGA	3.300.000.000	2.136.490.188	64,74
4.3	JASA GIRO	400.000.000	219.798.083	54,95
4.4	BUNGA DEPOSITO	450.000.000	-	0,00
4.5	PENERIMAAN LAINNYA	2.450.000.000	1.331.950.939	54,37
	TOTAL LAIN-LAIN PAD YANG SAH	6.600.000.000	3.715.193.310	56,29
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	38.435.000.000	31.466.406.283	81,87

No Rek	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	B. DANA PERIMBANGAN			
	I. BAGI HASIL PAJAK			
	1.1 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	35.000.000.000	26.912.900.324	76,89
	1.2 PAJAK PENGHASILAN	4.000.000.000	1.100.942.940	27,52
	TOTAL BAGI HASIL PAJAK	39.000.000.000	28.013.843.264	71,83
	II. BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM			
	2.1 P S D H	609.000.000	411.431.236	67,56
	2.2 R O Y A L T Y	7.605.000.000	11.707.340.277	153,94
	2.3 P E R I K A N A N	163.000.000	343.986.219	211,03
	TOTAL BAGI HASIL SDA	8.377.000.000	12.462.757.732	148,77
	III. DANA ALOKASI UMUM (DAU)			
	DANA ALOKASI UMUM	404.588.285.000	404.588.285.000	100,00
	TOTAL DANA ALOKASI UMUM	404.588.285.000	404.588.285.000	100,00
	IV. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
	DAK NON REBOISASI			
	4.1 PENDIDIKAN	13.379.680.000	13.379.680.000	100,00
	4.2 KESEHATAN	3.755.260.000	3.755.260.000	100,00
	4.3 INFRASTRUKTUR/JALAN	9.020.900.000	9.020.900.000	100,00
	4.4 INFRASTRUKTUR AIR MINUM	951.190.000	951.190.000	100,00
	4.5 PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	3.236.450.000	3.236.450.000	100,00
	4.6 KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.072.790.000	3.072.790.000	100,00
	4.7 PERTANIAN /KEHUTANAN	3.365.580.000	3.365.580.000	100,00
	4.8 LINGKUNGAN HIDUP	2.020.710.000	2.020.710.000	100,00
	4.9 KELUARGA BERENCANA	914.520.000	914.520.000	100,00
	4.10 KEHUTANAN	1.279.740.000	1.279.740.000	100,00
	4.11 SANITASI	1.233.990.000	1.233.990.000	100,00
	4.12 PERDAGANGAN	724.010.000	724.010.000	100,00
	4.13 TRANSPORTASI DARAT	410.980.000	410.980.000	100,00
	TOTAL DANA ALOKASI KHUSUS	43.365.800.000	43.365.800.000	100,00
	TOTAL DANA PERIMBANGAN	495.331.085.000	488.430.685.996	98,61
	C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH			
	I. BAGI HASIL PAJAK PROPINSI			
	1.1 PAJAK BHN BAKAR KEND. BERMTR	7.207.366.000	6.991.749.318	97,01
	1.2 BEA BALIK NAMA KEND. BERMOTOR	1.985.000.000	1.534.868.469	77,32
	1.3 PAJAK KEND. BERMOTOR	1.725.000.000	1.920.504.001	111,33
	1.4 PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH	100.000.000	31.910.840	31,91
	TOTAL BAGI HASIL PAJAK PROPINSI	11.017.366.000	10.479.032.628	95,11
	II. DANA PENYESUAIAN			
	2.1 TUNJANGAN KEPENDIDIKAN	37.085.691.000	37.108.930.680	100,06
	2.1.1 TUNJANGAN PROFESI GURU	31.805.691.000	31.828.930.680	100,07
	2.1.2 TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	5.280.000.000	5.280.000.000	100,00
	2.2 DANA AD-HOCK (DPPIP DAN DPIP)	-	88.721.000	
	2.3 DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	-		
	TOTAL DANA PENYESUAIAN	37.085.691.000	37.197.651.680	100,30
	III. PENERIMAAN LAINNYA			
	3.1 PENERIMAAN DANA TASPEN	260.000.000	66.231.840	25,47
	3.2 BANTUAN BANK DUNIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR	1.000.000.000	362.535.000	36,25
	3.3 HIBAH PUSAT	2.272.400.000	2.408.840.000	106
	3.4 DBH BPHTB		481.469.231	
	TOTAL PENERIMAAN LAINNYA	3.532.400.000	3.319.076.071	93,96
	TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	51.635.457.000	50.995.760.379	98,76
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	585.401.542.000	570.892.852.658	97,52

3. Permasalahan Dan Solusi

Adapun Permasalahan dan Solusi di Bidang Pendapatan dalam tahun 2012, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi atas kewajibannya terhadap daerah.
2. Kurangnya koordinasi Dinas Pendapatan Daerah dan SKPD pengelola pendapatan.
3. Kurangnya kualitas petugas (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
4. Kurangnya fasilitas dan sarana pendukung (kendaraan) dalam pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah.
5. Kurangnya pengawasan secara langsung oleh Pemerintah Kota Ternate, dalam hal ini PPNS terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak mematuhi peraturan daerah.
6. Data base sumber-sumber pendapatan yang belum akurat.

b. Solusi

1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dengan melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi secara intens, serta menegakkan dan menerapkan sanksi yang tegas (sesuai ketentuan) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang sengaja melalaikan kewajibannya.
2. Perlunya koordinasi yang intensif bagi SKPD pengelola pendapatan asli daerah.
3. Meningkatkan kualitas petugas (SDM) dengan mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan seminar, workshop dan lokakarya yang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah, melakukan sosialisasi, pembekalan dan penyuluhan tentang peraturan daerah dan aturan-aturan yang berlaku kepada petugas secara berkala.

4. Menyediakan fasilitas dan sarana pendukung (kendaraan) untuk kelancaran kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan pengawasan dari PPNS terhadap pelanggaran Perda oleh wajib pajak dan wajib retribusi.
6. Penyusunan data base pendapatan yang akurat.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Dengan mengacu pada kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran APBD tahun 2012, maka kebijakan umum keuangan daerah diarahkan pada komponen belanja langsung, dengan sasaran utama pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur serta peningkatan Sektor Potensial Bidang Perikanan, jasa dan perdagangan, usaha kecil dan menengah dalam rangka penguatan potensi ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Target dan Realisasi Belanja

Adapun anggaran belanja dalam APBD Kota Ternate tahun 2012 sebesar Rp. 599.944.240.370,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 567.508.238.542,- atau 94,59 % dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Adapun belanja Tidak langsung dalam APBD tahun 2012 sebesar Rp. 336.423.174.044,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 332.186.884.001,- atau 98,74 % dari total anggaran, dengan rincian komponen belanja tidak langsung sebagai berikut :

- Belanja Pegawai dalam tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 313.374.517.144,- dengan realisasi belanja hingga akhir

tahun sebesar Rp. 318.834.554.081,- atau 101,74% dari total anggaran, pelampauan ini terdapat pada bidang pendidikan dan kesehatan yaitu untuk penambahan pembayaran sertifikasi guru dan tenaga medis.

- Belanja Bunga tahun 2012 dianggarkan Sebesar Rp. 37.000.000.-.
- Belanja Hibah dalam tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 3.850.000.000,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 1.900.000.000,- atau 49,35% dari total anggaran.
- Belanja Bantuan sosial dalam tahun 2012 dianggarka sebesar Rp. 9.350.756.900,- dengan realisasi hingga akhir tahun sebesar Rp. 4.379.286.050,- atau sebesar 46,83% dari total anggaran.
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 538.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 520.739.120,- atau sebesar 96,70%.
- Belanja Tidak terduga pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.9.272.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.552.304.750,- atau sebesar 70,66%

b. Belanja Langsung

Adapun belanja Langsung dalam APBD tahun 2012 sebesar Rp. 263.521.066.326,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 235.348.354.472,- atau 89,31 % dari total anggaran, dengan rincian komponen belanja langsung sebagai berikut :

- Belanja Pegawai dalam tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 41.856.185.040,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 35.584.124.162,- atau 85,02% dari total anggaran

- Belanja Barang dan Jasa dalam tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 111.998.380.219,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 97.145.237.706,- atau 86,74% dari total anggaran
- Belanja Modal dalam tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 109.666.501.067,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 102.591.992.673,- atau 93,55 % dari total anggaran.

3. Permasalahan Dan Solusi

Adapun Permasalahan dan Solusi di bidang belanja daerah dalam tahun 2012, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Kebijakan regulasi yang begitu cepat dan cenderung berubah-ubah, menyebabkan masih adanya sebagian komponen belanja belum dapat disesuaikan dengan pedoman yang baru.
2. Tuntutan dan kebutuhan alokasi belanja dari masing-masing satuan kerja belum dapat dipenuhi secara optimal.
3. Sebagian komponen belanja yang terdapat pada standar belanja (*chek price*) tidak sesuai dengan harga pasar yang cenderung fluktuatif.

b. Solusi

1. Perlu sosialisasi lebih lanjut terhadap kebijakan regulasi pengelolaan belanja sesuai pedoman yang baru.
2. Peningkatan sumber-sumber pendapatan agar secara bertahap dapat dipenuhi kebutuhan belanja dari satuan kerja.
3. Perlu mensinkronkan standar belanja (*chek price*) dalam penyusunan RKA-SKPD dengan mengantisipasi kemungkinan harga pasar yang cenderung fluktuatif.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib tahun 2012, terdiri dari 287 program dan 1.627 kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Urusan Wajib Bidang Pendidikan, terdiri dari 19 program dan 174 kegiatan
- 2) Urusan Wajib Bidang Kesehatan, terdiri dari 21 program dan 97 kegiatan
- 3) Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum, terdiri dari 16 program dan 105 kegiatan
- 4) Urusan Wajib Bidang Perumahan, terdiri dari 5 program dan 21 kegiatan
- 5) Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang, terdiri dari 8 program dan 53 kegiatan
- 6) Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan, terdiri dari 11 program dan 71 kegiatan
- 7) Urusan Wajib Bidang Perhubungan, terdiri dari 12 program dan 62 kegiatan
- 8) Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari 12 program dan 63 kegiatan
- 9) Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari 8 program dan 39 kegiatan
- 10) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari 7 program dan 32 kegiatan
- 11) Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari 8 program dan 44 kegiatan

- 12) Urusan Wajib Bidang Sosial, terdiri dari 8 program dan 29 kegiatan
- 13) Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari 3 program dan 11 kegiatan
- 14) Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari 8 program dan 36 kegiatan
- 15) Urusan Wajib Bidang Kebudayaan, terdiri dari 7 program dan 40 kegiatan
- 16) Urusan Wajib Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari 9 program dan 42 kegiatan
- 17) Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, terdiri dari 20 program dan 70 kegiatan
- 18) Urusan Wajib Bidang Pemerintahan Umum, terdiri dari 84 program dan 522 kegiatan
- 19) Urusan Wajib Bidang Kepegawaian, terdiri dari 4 program dan 45 kegiatan
- 20) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari 10 program dan 29 kegiatan
- 21) Urusan Wajib Bidang Kearsipan, terdiri dari 7 program dan 42 kegiatan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi dan Realisasi anggaran untuk urusan wajib sampai akhir tahun 2012, sesuai Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan fungsi pelayanan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 567.005.791.175,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 522.449.567.273,- atau 92,14 %, yang meliputi urusan wajib sebagai berikut :

- 1) Urusan Wajib Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 210.870.886.852,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 215.639.625.846,- atau 102,26%

- 2) Urusan Wajib Bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.244.021.293,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 29.880.735.556,- atau 102,18 %
- 3) Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.362.050.718,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 60.042.804.062,- atau 91,86 %
- 4) Urusan Wajib Bidang Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.292.291.120,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 4.025.727.612,- atau 93,79 %
- 5) Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.706.111.763,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp.7.776.823.879,- atau 89,33 %
- 6) Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.109.849.706,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp.9.580.111.978,- atau 94,76 %
- 7) Urusan Wajib Bidang Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.506.089.876,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 13.106.285.241,- atau 97,04%
- 8) Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.486.652.212,- realisasi sampai akhir tahun Rp. 14.546.500.147,- atau 93,93 %
- 9) Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.163.418.807,- realisasi sampai akhir tahun Rp. 2.839.301.126,- atau 89,75 %
- 10) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.395.846.471,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 1.236.561.586,- atau 88,59%
- 11) Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan alokasi anggaran sebesar

- Rp. 4.004.189.812,- realisasi sampai akhir tahun
Rp. 3.956.614.270,- atau 98,81 %
- 12) Urusan Wajib Bidang Sosial dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 3.367.903.919,- realisasi sampai akhir tahun
Rp. 3.211.139.501,- atau 95,35%
 - 13) Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 585.735.250,- realisasi sampai akhir tahun
Rp. 575.685.250,- atau 98,28%
 - 14) Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.497.461.623,- realisasi
sampai akhir tahun Rp. 2.253.222.609,- atau 90,22 %
 - 15) Urusan Wajib Bidang Kebudayaan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 7.321.642.748,- realisasi sampai akhir tahun
sebesar Rp. 5.931.950.459,- atau 81,02 %
 - 16) Urusan Wajib Bidang Pemuda dan Olah Raga dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 3.705.117.836,- realisasi sampai akhir
tahun sebesar Rp. 3.410.562.817,- atau 92,05 %
 - 17) Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.109.954.170,-
realisasi sampai akhir tahun Rp. 8.394.961.223,- atau 92,15 %
 - 18) Urusan Wajib Bidang Pemerintahan Umum dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 156.868.070.194,- realisasi sampai akhir
tahun Rp. 120.076.319.935,- atau 76,55 %
 - 19) Urusan Wajib Bidang Kepegawaian dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 8.444.469.947,- realisasi sampai akhir tahun
sebesar Rp. 8.043.575.664,- atau 95,25 %
 - 20) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.394.964.495,- realisasi
sampai akhir tahun sebesar Rp. 5.594.899.371,- atau 87,49%

- 21) Urusan Wajib Bidang Kearsipan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.569.062.363,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 2.326.159.141,- atau 90,55 %

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum adanya keterpaduan regulasi urusan wajib antara kementerian dengan pemerintah daerah, menimbulkan tumpang-tindih kebijakan program.
- 2) Pelaksanaan urusan wajib yang umumnya meliputi kebijakan pelayanan dasar, belum diikuti dengan pelimpahan kewenangan dan alokasi anggaran yang memadai dari Pemerintah Pusat.

b. Solusi

- 1) Perlu adanya keseragaman kebijakan regulasi urusan wajib, sehingga terwujud sinergitas program pusat dan daerah.
- 2) Perlu adanya batasan kewenangan yang jelas antar tingkat pemerintahan, sehingga pelaksanaan urusan wajib lebih optimal.

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pilihan tahun 2012 terdiri dari 51 program dan 245 kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Urusan Pilihan Bidang Pertanian, terdiri dari 24 program dan 101 kegiatan
- 2) Urusan Pilihan Bidang Kehutanan, terdiri dari 3 program dan 13 kegiatan
- 3) Urusan Pilihan Bidang Pariwisata, terdiri dari 3 program dan 24 kegiatan

- 4) Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 10 program dan 47 kegiatan
- 5) Urusan Pilihan Bidang Perdagangan, terdiri dari 7 program dan 37 kegiatan
- 6) Urusan Pilihan Bidang Perindustrian, terdiri dari 4 program dan 23 kegiatan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi dan Realisasi anggaran untuk urusan pilihan sampai akhir tahun 2012, sesuai Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan fungsi pelayanan SKPD sebesar Rp. 32.938.449.195,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 31.706.341.349,- atau 96,26% yang meliputi urusan pilihan sebagai berikut :

- 1) Urusan Pilihan Bidang Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.856.046.127,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 11.479.290.975,- atau 96,82%
- 2) Urusan Pilihan Bidang Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.466.251.000,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 1.432.720.500,- atau 97,71 %
- 3) Urusan Pilihan Bidang Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.771.875.000,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 1.398.650.000,- atau 78,94 %
- 4) Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.184.471.080,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 8.130.823.179,- atau 99,34%
- 5) Urusan Pilihan Bidang Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.235.995.454,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 6.885.135.670,- atau 95,15%
- 6) Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.423.810.534,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 2.379.721.025,- atau 98,18%

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Kurangnya koordinasi dan adanya perbedaan kebijakan regulasi pusat-daerah dalam kebijakan urusan pilihan.
- 2) Sering terjadi satu SKPD melaksanakan 2 (dua) urusan wajib dan pilihan sekaligus, sehingga selain tidak efisien juga sering menimbulkan kesulitan dalam klasifikasi belanja.
- 3) Urusan pilihan pada umumnya meliputi kegiatan strategis dan potensial yang bernilai investasi, namun dalam pelaksanaannya belum menyentuh tujuan dan sasaran yang dimaksud.

b. Solusi

- 1) Perlu adanya sinergitas kebijakan program urusan pilihan pusat-daerah serta keseragaman regulasi, sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan program/kegiatan urusan pilihan.
- 2) Pelaksanaan urusan pilihan perlu didukung dengan aspek kelayakan usulan program/kegiatan, sehingga mampu mendatangkan nilai tambah bagi investasi daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas Pembantuan pada hakekatnya dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk kepedulian/intervensi pemerintah terhadap daerah melalui kewenangan yang dimiliki dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tujuan utama Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan lebih lanjut bahwa Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2012 mendapat tugas pembantuan dari 3 (tiga) kementerian/lembaga.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemerintah yang memberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2012, dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia
- b. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
- c. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

3. Satuan Tugas Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate
- c. Dinas Kesehatan Kota Ternate

4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate

Program Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dengan kegiatan berupa kegiatan padat karya, kegiatan tenaga kerja mandiri yang ditempatkan pada usaha ekonomi produktif, serta kegiatan Terapan Teknologi Tepat Guna.

- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate

Program Peningkatan Daya Saing Produksi Perikanan Tangkap dengan kegiatan berupa Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan, Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan, dan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan kapal perikanan alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan.

- c. Dinas Kesehatan Kota Ternate

Program Upaya pembinaan kesehatan dengan kegiatan berupa Bantuan Operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas di Kota Ternate, Kegiatan pembangunan gedung puskesmas perawatan Kalumata dan Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboraturium.

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

a. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate

Sumber dana untuk 3 (tiga) kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berasal dari APBN, dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 505.250.000,-, realisasi hingga akhir tahun 100 %.

b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate

Sumber dana untuk 4 (Empat) kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan berasal dari APBN, dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 8.353.340.000,-, realisasi hingga akhir tahun 100 %.

c. Dinas Kesehatan Kota Ternate

Sumber dana untuk 3 (Tiga) kegiatan di Dinas Kesehatan berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.816.400.000,- dan realisasi hingga akhir tahun 100%

6. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan pada umumnya masih tetap sama dengan tahun-tahun yang lalu, meliputi :

1. Sarana dan prasarana penunjang tugas pembantuan yang masih terbatas
2. Sumber daya manusia yang belum memadai
3. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan cenderung seragam untuk seluruh Daerah dan Desa tanpa memperhatikan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan Daerah dan Desa
4. Penyelenggaraan tugas pembantuan pada umumnya belum didasarkan atas analisis kebutuhan penggunaan sumber-sumber daya dan perencanaan operasional yang dapat menjamin keberhasilan penyelenggaraannya

5. Inisiatif tugas pembantuan selama ini selalu datang dari pihak pemberi tugas, belum membuka peluang inisiatif dari pihak penerima tugas

b. Solusi

Solusi terhadap berbagai permasalahan tugas pembantuan, meliputi :

1. Pembiayaan pelaksanaan tugas pembantuan harus juga meliputi komponen sarana dan prasarana pendukung
2. Perlu disertai dengan pembiayaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagai pelaksana tugas pembantuan di tingkat operasional
3. Perlu ada penyesuaian terhadap objek urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan dengan melihat kebutuhan dan karakteristik wilayah
4. Perlu ada kajian-kajian teknis yang komprehensif atas kelayakan kegiatan pada masing-masing wilayah
5. Perlu diberikan ruang atau akses yang seluas-luasnya bagi pengambilan inisiatif pelaksanaan tugas pembantuan dari pihak penerima, terutama pada Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Untuk tugas pembantuan yang diberikan sesuai mekanisme tugas pembantuan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota, serta dari Kabupaten/Kota ke Desa dan tidak ada tugas pembantuan dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan. Namun demikian, seiring dengan adanya pemekaran Kecamatan dan Kelurahan serta dalam rangka merangsang partisipasi masyarakat untuk percepatan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, secara

internal Pemerintah Kota Ternate menempuh kebijakan melalui bantuan dana Partisipatif dan dan bantuan Stimulan lainnya bagi Kecamatan dan Kelurahan yang secara tidak langsung merupakan bagian pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Kebijakan Dan Kegiatan

Dalam rangka memberdayakan potensi daerah di tengah-tengah kemajuan dan kemampuan masing-masing daerah yang tidak sama, maka perlu ada kerjasama antar daerah di berbagai bidang. Adapun kerjasama antar daerah yang dijalin Pemerintah Kota Ternate dalam tahun 2012, antara lain :

Kerjasama Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (APEKSI) baik Nasional maupun APEKSI KOMWIL VI Kawasan Timur Indonesia, dengan realisasi Kegiatan berupa :

1. Loklatih Peningkatan PAD tanggal 13-16 Maret di Kota Ternate
2. Musyawarah Raker KOMWIL VI tanggal 27-29 Mei di Kota Manado
3. Musyawarah Nasional APEKSI tanggal 30-31 Mei 2012 di Kota Manado
4. Indonesia City Expo APEKSI 2012, tanggal 31 Mei - 04 juni 2012 di Kota Manado
5. Semiloka City Network Sultan Sapaku di Makassar tanggal 11-15 November 2012
6. Rapat Kerja teknis Apeksi di Kota Bandar Lampung 17-19 Oktober 2012

Disamping itu Pemerintah Kota Ternate juga menjalin kerjasama antar daerah, melalui Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), dengan realisasi Kegiatan berupa :

1. Rapat Kerja Jaringan Kota Pusaka Indonesia di Jakarta pada tanggal 15 April 2012

2. Pameran Jaringan Kota Pusaka Indonesia di Blitar pada tanggal 28 Juni 2012
3. Seminar Internasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia di Bengkulu pada tanggal 01 Agustus 2012
4. Kongres Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia di Surabaya pada tanggal 03 September 2012

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan Dan Kegiatan

Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang, maka Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga, meliputi :

1. Kerjasama Pemkot Dengan Kementerian Perumahan Rakyat Untuk Pembangunan Rumah Susun Di Kota Ternate.
2. Kerjasama Pemkot dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BP3) Ambon, dengan realisasi bentuk kerjasama terkait Pengembangan Sumber daya Manusia pada bidang pengelolaan hasil-hasil perikanan dan kelautan.
3. Kerjasama Pemkot dengan Perusahaan Penyalur TKI PT Fiekon Kencana Mandiri Jakarta Cabang Ternate, dengan realisasi kegiatan untuk pertama kalinya Pemerintah Kota Ternate mengirimkan 14 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di pabrik polywood PT. Shin Yan Serawak, Malaysia.
4. Kerjasama Pemkot Dengan KPP Pratama, dengan realisasi kegiatan Kerjasama bidang perpajakan ini berkaitan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak penghasilan, pengawasan kewajiban perpajakan berbendaharawan dan pengelolaan PBB dan BPHTB.

5. Kerjasama Pemkot Ternate dengan PT. Pertamina, dengan realisasi berupa penyaluran bantuan alat bantu kepada penyandang disabilitas di Kota Ternate.
6. Kerjasama Pemkot dengan Universitas Khairun, Universitas Muhamadiyah Maluku Utara, STAIN dan Politekes dalam rangka peningkatan SDM melalui Program Magister dan Diploma-III Kesehatan, yang direalisasikan dengan mengikutsertakan pegawai Pemerintah Kota Ternate dalam menempuh pendidikan Program Magister di Universitas Khairun, Universitas Muhamadiyah Maluku Utara dan STAIN serta program Diploma III pada Politeknik Kesehatan Ternate.

C. KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Kebijakan

Koordinasi dengan instansi vertikal disesuaikan dengan ruang lingkup permasalahannya, sehingga bentuknya dapat berupa forum koordinasi pimpinan daerah, rapat pimpinan, rapat koordinasi, rapat evaluasi, rapat teknis, rapat biasa, koordinasi dalam hal pemungutan pajak pusat yang ada di daerah, bantuan keuangan dan kegiatan lain yang memerlukan keterlibatan instansi vertikal, seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan, pembentukan tim kerja sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan tim asistensi dalam suatu kegiatan dan bentuk-bentuk koordinasi lainnya. Sedangkan permasalahan yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Ternate kepada instansi vertikal yang berada di Ternate, meliputi masalah :

- a. Ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama
- c. Konsultasi peraturan-perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas instansi vertikal

- d. Penyelesaian suatu kasus/masalah yang berkaitan dengan tugas instansi vertikal tertentu
- e. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan
- f. Pengembangan SDM
- g. Penerimaan keuangan Negara
- h. Pembiayaan
- i. Ipoleksosbudhankam

2. Realisasi Kegiatan

Realisasi koordinasi dengan instansi vertikal pada tahun 2012, antara lain dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) *Coffe break* di kelurahan, yaitu kegiatan bulanan berupa tatap muka walikota beserta Kapolres dan Dandim dengan warga di tingkat kelurahan untuk mengetahui perkembangan kondisi keamanan sekaligus mendengarkan keluhan dan aspirasi warga.
- 2) Rapat koordinasi dalam rangka memperingati hari-hari besar Nasional dan keagamaan.
- 3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang KDRT, Undang-undang Lalu lintas dan lain-lain
- 4) Koordinasi dengan KPP Pratama dalam rangka kelancaran pemungutan pajak pusat yang ada di daerah.
- 5) Koordinasi dalam rangka pelaksanaan event nasional seperti Peringatan HKSAN (Hari Kesetiakawanan Nasional) di Kota Ternate dan Sail Indonesia Morotai di Maluku Utara .
- 6) Koordinasi dengan Pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Bastiong dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pemerintahan Kota Ternate.
- 7) Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate dengan PPE Regional SUMAPAPUA terkait Penilaian Kota Sehat/Adipura, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Rapat teknis pemantauan Adipura
 - b. Rapat/koordinasi ekspose hasil pemantauan Adipura
 - c. Rapat/koordinasi kerja bakti bersama
 - d. Rapat/koordinasi pembentukan tim koordinasi Adipura
- 8) Koordinasi Badan Pengendalian Kependudukan dan KB Kota Ternate dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
- a. Rapat Kerja Daerah Program KB
 - b. Rapat Evaluasi Program KB
 - c. Bhakti Sosial Dengan Mitra Kerja (melibatkan TNI-POLRI)
 - d. Koordinasi Kegiatan KS
- 9) Koordinasi oleh Badan KESBANGPOL-LINMAS Kota Ternate dengan TNI- POLRI dalam memfasilitasi pembentukan lembaga ekstra (sesuai Keputusan Walikota Ternate) yang keanggotaannya terdiri dari beberapa unsur terkait, baik pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM /NGO, Perguruan Tinggi maupun *stakeholder* lainnya termasuk instansi vertikal maupun TNI dan POLRI. Lembaga ekstra yang dibentuk antara lain :
- a. Forum Koordinasi antar Umat Beragama (FKUB) Kota Ternate (berdasarkan Peraturan Bersama Kementrian Agama dan Kementrian Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006);
 - b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Ternate (berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006) ;
 - c. Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Kota Ternate (berdasarkan Permendagri Nomor 49 Tahun 2010);
 - d. Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Ternate (berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2011);

e. Satuan Tugas (SATGAS) Kewilayahan Kota Ternate (sesuai Keputusan Walikota Ternate Nomor 162 / III.6 / KT / 2010 Tahun 2010.

10) Koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia Cabang Maluku Utara, melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi dan Ekonomi Daerah.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Pembinaan batas wilayah merupakan sarana untuk membina persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Batas wilayah merupakan

Hal yang penting terutama kaitannya dengan pemekaran dan penghapusan wilayah/daerah, karena akan memberikan kejelasan batas-batas kewenangan Pemerintah Daerah secara pasti sehingga menghindari terjadinya konflik yang timbul karena adanya ketidakjelasan batas wilayah.

Kota Ternate tidak memiliki batas darat dengan daerah lain. Wilayah Kota Ternate dibatasi oleh laut Maluku dan Selat Halmahera. Pada kegiatan Evaluasi Penegasan Batas Antar Daerah secara Pasti di Lapangan tanggal 12 November 2012 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi, diketahui bahwa batas darat antar kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara berjumlah 8 segmen batas yang akan diselesaikan penegasan batas wilayahnya tahun ini. Kota Ternate tidak termasuk dalam 8 segmen tersebut, dapat dikatakan batas wilayah Kota Ternate hingga saat ini tidak bermasalah atau bersengketa dengan daerah lain.

Pembinaan batas wilayah tidak hanya terbatas pada batas antar daerah, tetapi dimulai dari wilayah pemerintahan terendah dalam hal ini batas wilayah kelurahan, karena batas kelurahan sekaligus menjadi batas

wilayah pemerintahan yang lebih tinggi yaitu batas kecamatan, batas kabupaten/kota, batas provinsi dan batas negara.

Pada tahun 2012 Pemerintah Kota Ternate membentuk tim penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan melalui Keputusan Walikota Ternate Nomor 136/1.1/KT/2012 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Ternate Tahun 2012. Tim penegasan terdiri dari unsur Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan), BPN, BAPPEDA, Dinas PU, KPP Paratama serta para camat dan lurah. Tim tersebut melaksanakan tugas :

- a. Menginventarisasi, mengkaji dan menetapkan dasar hukum tertulis yang akan dijadikan dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan.
- b. Mensosialisasikan sistem dan mekanisme penetapan dan penegasan batas kecamatan dan kelurahan.
- c. Melakukan supervisi dan verifikasi terhadap proses dan hasil kerja tim
- d. Merekomendasikan peta batas daerah kepada walikota untuk ditandatangani, dan
- e. Melaporkan semua tahap kegiatan kepada walikota.

Tahapan penegasan batas wilayah di darat berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006, meliputi :

- a. Penelitian dokumen
- b. Pelacakan batas
- c. Pemasangan pilar batas
- d. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas
- e. Pembuatan peta batas

Tim penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan melakukan penelitian dokumen dengan meneliti dasar hukum pembentukan kelurahan dan kecamatan. Secara umum batas wilayah kelurahan dan kecamatan memang telah tertuang pada peraturan daerah

pembentukan kecamatan dan kelurahan, namun dari pelacakan batas di sejumlah kelurahan dan kecamatan masih ditemui ketidakjelasan batas. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara yuridis, batas wilayah kecamatan/kelurahan telah ditetapkan dalam peraturan daerah pembentukan kecamatan/kelurahan, namun secara fisik di lapangan masih terjadi tarik menarik batas wilayah antar warga di wilayah perbatasan.

Dari penelitian dokumen dan pelacakan batas di lapangan tim telah menginventarisir beberapa segmen batas kecamatan/kelurahan yang bermasalah, sebagaimana yang terurai pada tabel berikut :

Tabel III
Data Permasalahan Batas Wilayah Kota Ternate

No	Segmen Batas Kecamatan dan Kelurahan Yang Bermasalah	
1.	Kecamatan Pulau Ternate	Kecamatan Kota Ternate Utara
2.	Kecamatan Pulau Ternate	Kecamatan Kota Ternate Selatan
3.	Kelurahan Kulaba	Kelurahan Tarau
4.	Kelurahan Jambula	Kelurahan Sasa
5.	Kelurahan Toboko	Kelurahan Tanah-tinggi
6.	Kelurahan Ngade	Kelurahan Fitu
7.	Kelurahan Salero	Kelurahan Kasturian
8.	Kelurahan Sulamadaha	Kelurahan Tobololo
9.	Kelurahan Sulamadaha	Kelurahan Takome

Selain menginventarisir segmen batas yang bermasalah, tim telah melakukan pemasangan pilar survey batas wilayah pada 31 segmen batas kelurahan dan dua segmen batas kecamatan yang telah memiliki batas fisik yang jelas di lapangan. Kegiatan pembinaan batas kecamatan dan kelurahan dilakukan secara bertahap karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya tim penegasan akan melanjutkan tahapan penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan pada tahun 2013 dan menargetkan

terselesaikannya konflik batas pada sembilan segmen batas di atas. Ketidakjelasan batas hingga saat ini belum menjadi permasalahan akut yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Menyikapi dampak erupsi Gunung Gamalama di akhir tahun 2011 yang terjadi susul menyusul sampai pada tahun 2012, membawa konsekuensi turunnya lahar dingin pada beberapa kawasan rawan bencana, antara lain Kel. Maliaro, Kel. Tubo dan Kel. Togafo, dengan mengalirnya pengungsi pada 9 titik dengan jumlah 2711 jiwa / 627 KK, sedangkan kerugian berupa kerusakan rumah dengan rusak total : 30 unit, rusak sedang : 86 unit dan kemasukan Lumpur : 700 unit, dan untuk kerusakan jembatan sejumlah 6 jembatan serta rusaknya sejumlah talud akibat gerusan air (erosi) pada beberapa kawasan rawan bencana seperti sungai Tugurara dan Maliaro. Oleh karena itu langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan bencana yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Ternate, antara lain normalisasi sungai dan revitalisasi barangka, perbaikan talud, jalan dan jembatan serta sosialisasi dan relokasi perumahan warga pada kawasan yang aman.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Sejalan dengan pertumbuhan Kota Ternate yang terus meningkat, maka berkembang pula beberapa kawasan yang memiliki nilai strategis dan ekonomis karena merupakan sentra-sentra jasa dan perekonomian, oleh karena itu agar kawasan-kawasan strategis tersebut dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tetap terjaga nilai ekonomisnya, maka dalam tahun 2012 telah di keluarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032.

G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Secara umum pada tahun 2012 situasi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota Ternate relatif kondusif, meskipun masih mudahnya masyarakat terprovokasi oleh isu-isu yang digulirkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab sehingga sering menimbulkan ketegangan bagi masyarakat. Beberapa masalah terkait dengan gangguan keamanan selama ini dapat diatasi, namun demikian stabilitas dan kondisi keamanan daerah perlu tetap mendapat perhatian, untuk menjamin kenyamanan masyarakat luas dalam melaksanakan aktifitas sosial dan ekonomi.

1. Gangguan Yang Terjadi

- a) Eskalasi kejadian pertikaian masyarakat/pemuda antar kampung di Kota Ternate pada tahun 2012 dapat dikatakan mengalami peningkatan dari pada tahun-tahun sebelumnya dimana tercatat sebanyak 12 kasus tawuran.
- b) Adapun gangguan lain yang cukup menonjol dan meresahkan warga masyarakat diantaranya adalah maraknya peredaran minuman keras dan judi.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Lembaga teknis yang mengemban Tugas dan Fungsi penanganan Ketertiban dan Ketenteraman Umum pada lingkup Pemerintah Kota Ternate adalah Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Ternate serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) yang tentunya dalam penugasan tersebut senantiasa dikoordinasikan bersama aparat POLRES Ternate, KODIM 1501 Ternate dan instansi lainnya, baik dengan melakukan penertiban maupun berbagai razia terhadap kegiatan yang dapat mengarah pada gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

Adapun jumlah personel dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 63 pegawai, yang terdiri dari personel di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sebanyak 32 pegawai dengan, dan dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 31 pegawai.

4. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Adapun sumber dan jumlah anggaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum berasal dari APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2012 dengan total nilai anggaran Rp. 9.109.954.170,-

5. Penanggulangan Dan Kendalanya

- ✓ Terhadap kasus pertikaian antara warga yang terjadi, Pemerintah Kota Ternate dalam penanganan dan penanggulangannya senantiasa melakukan koordinasi bersama aparat keamanan (POLRES Kota Ternate) yang secara langsung melerai kelompok yang bertikai sekaligus menempati dan menjaga titik-titik rawan terutama areal batas antara Kelurahan. Upaya selanjutnya adalah memfasilitasi pertemuan antara Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda guna membuat kesepakatan dan perjanjian damai dengan ketentuan pemberian sanksi tegas jika masih ada diantara pihak-pihak yang mencoba mengulangi atau membuat masalah. Dalam penyelesaian masalah lapangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum masih sering ditemukan kendala karena kurangnya kesadaran warga dalam menyaring informasi negatif sehingga sangat rentan terhadap isu dan mudah terprovokasi.
- ✓ Terhadap penanganan peredaran minuman keras dan judi (Togel) juga senantiasa dilakukan koordinasi data dan informasi

bersama pihak terkait untuk selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Guna menindaklanjuti beberapa regulasi Pemerintah Pusat sekaligus sebagai upaya koordinatif dalam rangka memantau, mengkomunikasikan data dan informasi tentang perkembangan situasi dan isu strategis (kondisi IPOLEKSOSBUD-HANKAM) di Kota Ternate maka Badan Kesbangpol dan Linmas telah memfasilitasi pembentukan kelembagaan yang melibatkan unsur Pemerintah, Polri, TNI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, unsur Perguruan Tinggi dan Stakeholder dan unsur terkait lainnya, yaitu:

1. Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Ternate;
2. Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) Kota Ternate;
3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Ternate;
4. Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Kota Ternate.
5. Satuan Tugas (SATGAS) Kewilayahan Kota Ternate.

BAB VII

P E N U T U P

Berdasarkan gambaran kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa dalam walaupun pelaksanaan APBD Kota Ternate Tahun 2012 diperhadapkan pada beberapa permasalahan tidak tercapainya sejumlah target pendapatan dan terjadinya defisit, namun secara umum program/kegiatan dapat berjalan dengan baik serta tugas dan fungsi pelayanan publik tidak terganggu.

Kita sadari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ, adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan LKPJ di maksud, sesuai pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 hanya dibahas oleh DPRD secara internal dan *output*-nya berupa keputusan DPRD dalam bentuk rekomendasi yang berupa catatan strategis dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan, namun kita semua menghargai bahwa hal ini selain merupakan bagian dari prosedur dan mekanisme normatif yang harus kita penuhi, juga merupakan bagian dari komitmen bersama untuk melakukan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Karena kita sadari masih banyak terdapat kekurangan dan permasalahan yang menuntut tanggung jawab kita bersama. Di samping itu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran ini akan menjadi laporan awal tentang penyelenggaraan pemerintahan, sebelum kita masuk pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Akhir Tahun Anggaran yang sesuai aturan normatif akan disampaikan setelah diperiksa oleh BPK, yang mencakup laporan nota perhitungan, aliran kas dan neraca daerah.

Demikian pokok-pokok substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, untuk selanjutnya akan menjadi referensi kajian Dewan yang terhormat.

Mengakhiri laporan ini, Saya bersama Saudara Saya Ir. Arifin Djafar, MM selaku Walikota dan Wakil Walikota Ternate, perlu menyampaikan apresiasi secara khusus kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, karena melalui jalinan kemitraan dalam tahun 2012 bersama Pemerintah Kota Ternate berhasil mengeluarkan berbagai peraturan daerah yang penting dan strategis, antara lain Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Ternate 2012-2032 dan beberapa produk peraturan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah, antara lain Perda tentang pengelolaan sampah, pajak bumi dan bangunan, tanda daftar gudang dan surat izin perdagangan, serta berbagai produk perda lainnya. Disamping dukungan dewan terhadap beberapa kebijakan strategis walikota yang tertuang Peraturan Walikota, seperti Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Ternate Tahun 2013 dalam rangka penguatan pelayanan publik. Langkah-langkah kebijakan ini sangat penting mengingat berbagai tantangan dan permasalahan kedepan semakin kompleks, yang membutuhkan komitmen dan tanggung jawab kita bersama, terutama dalam menciptakan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melalui tertib penyampaian laporan pertanggungjawaban yang selalu kita laksanakan tepat waktu, sesuai *schedule* yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, serta berbagai saran dan catatan strategis yang disampaikan dalam konteks laporan ini, dalam rangka mengefektifkan kebijakan kedepan.

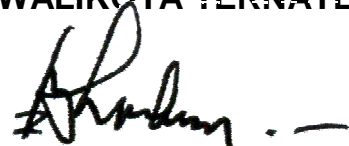
Selanjutnya, menyikapi dinamika perkembangan sosial politik menjelang agenda Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara beberapa bulan kedepan, Saya menghimbau kepada seluruh elite politik dan masyarakat luas untuk merespon agenda demokrasi ini dengan kearifan

dan kedewasaan, hindari sikap arogansi dan anarkisme, sehingga proses suksesi ini dapat berjalan dengan aman dan lancar serta stabilitas kamtibmas dapat terjaga dengan baik.

Terima kasih dan penghargaan pula kami sampaikan kepada para Muspida, Pimpinan instansi vertikal maupun pihak ketiga, yang telah menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Ternate selama ini, demikian pula atas peran pers dan media massa maupun unsur *stakeholder* lainnya dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Ternate.

Ternate, 13 Maret 2013

WALIKOTA TERNATE - -

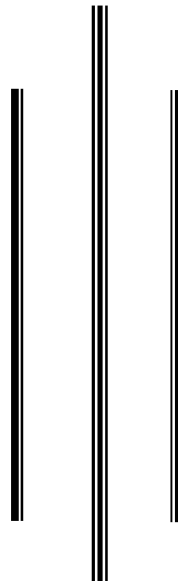


H. BURHAN ABDURAHMAN



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2012
DIHADAPAN SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TERNATE**

TANGGAL, 13 MARET 2013



PEMERINTAH KOTA TERNATE

TAHUN 2013